

# MODEL SOSIAL TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENCiptAKAN BUDAYA TRANSPARAN SEBAGAI KUNCI PERUBAHAN TERHADAP MASYARAKAT: *Conceptual Framework*

Diah Triesia<sup>1</sup>, Darius Antoni<sup>2</sup>, Muhamad Akbar<sup>3</sup>

Program Studi Magister Teknik Informatika, Program Pasca Sarjana  
Universitas Bina Darma  
[diah\\_triesia@yahoo.co.id](mailto:diah_triesia@yahoo.co.id)<sup>1</sup>  
[darius.antoni@binadarma.ac.id](mailto:darius.antoni@binadarma.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muhamad.akbar@binadarma.ac.id](mailto:muhamad.akbar@binadarma.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** Dalam beberapa tahun terakhir ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat serta berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial teknologi dan sosial media. Sosial teknologi informasi dipergunakan semaksimal mungkin oleh beberapa negara berkembang untuk memberikan informasi serta mempromosikan keterbukaan informasi dalam pemerintahan, serta meningkatkan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu konsep teknologi informasi yang berguna membahas dampak potensial dari penggunaan sosial teknologi informasi di transparansi dan budaya pemerintahan melalui sosial teknologi dan sosial media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang transparan diperlukan inisiatif dan pemahaman budaya setiap pemerintahan sebagai kunci perubahan.

## 1. Latar Belakang

Teknologi informasi (TI) sudah digunakan sebagai alat perubahan di organisasi dan instansi pemerintahan. Sosial teknologi adalah salah satu jenis teknologi informasi yang saat ini digunakan sebagai kunci perubahan dalam transparansi dan keterbukaan informasi di Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Pemerintahan kota Palembang adalah salah satu contoh pemerintahan yang menggunakan social teknologi seperti *Facebook*, *Tweeter* dan *Instagram* untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, penggunaan sosial teknologi sangat membutuhkan *feedback* dari masyarakat kota Palembang agar informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat diterima dan dimengerti secara tepat dan benar. Budaya salah satu kendala dalam penyampaian keterbukaan informasi melalui sosial teknologi dan sosial media karena setiap lingkungan pemerintahan memiliki budaya yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari – hari sehingga mempersulit menerima dan mengerti informasi yang telah diterima. Pada *website* pemerintah kota Palembang hanya menyediakan informasi mengenai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh wali kota Palembang Harnojoyo, yaitu melaksanakan kegiatan gotong royong dalam membersihkan setiap lingkungan yang ada di kota Palembang. Dalam *website* ini juga terdapat layanan untuk mengurus perizinan dan jasa publik dan informasi hiburan disana merupakan jejak wisata di kota Palembang. Tidak hanya *website*, pemerintah kota Palembang juga berinteraksi dengan masyarakat melalui sosial media seperti *facebook*, *twitter* dan *instagram*. Maka itu interaksi bapak wali kota kepada masyarakat bisa diterima

secara langsung dan bisa ditindak lanjuti secara cepat. Transparansi yang dimaksud disini adalah menyediakan peraturan pemerintah dan hak-hak masyarakat, memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah, mempromosikan pemantauan tindakan pemerintah dan pengeluaran, menyebarluaskan informasi kinerja pemerintahan. Dengan adanya informasi tersebut dan diterapkan kedalam sosial teknologi dan sosial media untuk diberikan kepada masyarakat kota Palembang sesuai dengan budaya yang ada maka tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan akan tercapai demi terciptanya kunci perubahan yang besar. Dengan adanya pemerintahan yang transparan maka kunci terbesar dalam pemerintahan adalah mempersempit kemungkinan pegawai pemerintahan untuk korupsi dan kinerja pemerintah semakin berkembang untuk membangun pemerintahan kota Palembang.

## 2. Riset Metodologi

Dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sebagai metode utama. Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konseptualisasi lebih dalam dan lebih jelas tentang penerapan transparansi pada *e-government* kota Palembang. Sebuah metode literature pustaka sangat cocok digunakan untuk menciptakan dasar yang kuat untuk memajukan pengetahuan dan teori pembangunan, sebuah tinjauan literature sistematis melibatkan tiga kegiatan berurutan dari *input*, proses dan *output* (Antoni, 2015). Dengan demikian artikel dan jurnal yang relevan yang diidentifikasi dari *Google Scholar*, *Science Direct*, *Informit* dan *IEEE* menggunakan istilah pencarian “*social media*”, “*Public sector*”, “*Peranan social teknologi di masyarakat*”.

**Table 1.** Hasil dari pencarian jurnal dan artikel tentang *social media* di masyarakat.

No	Database Name	Year				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	<i>Google Scholar</i>	2	1	1	1	2
2.	<i>Science Direct</i>		1			1
3.	<i>Informit</i>				2	
4.	<i>IEEE</i>	1				

**Table 2.** Penelitian Terdahulu

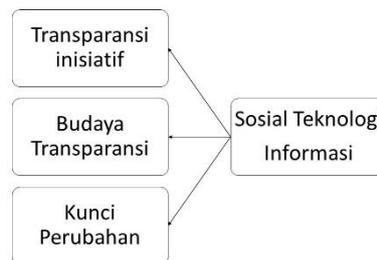
No	Penelitian	Kerangka untuk Mengukur Interaksi Sosial media kepada masyarakat		
		Transparasi	Budaya	Kunci Perubahan
1.	Hidayat (2012)	✓		
2.	Welta (2013)	✓		
3.	Kristene (2012)	✓	✓	✓
4.	Mergel (2013)	✓	✓	✓
5.	Kurniasih (2014)	✓		✓
6.	Brown (2005)	✓	✓	✓
7.	Lord (2006)	✓	✓	✓
8.	Shim (2008)	✓	✓	

9.	Bruns (2008)	✓	✓	✓
10.	Bhatnagar (2003)	✓	✓	✓
	John C. Bertot, Paul T.		✓	
11.	Jaeger, Justin M. Grimes (2010)	✓		✓

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sosial teknologi dan sosial media merupakan tempat berdialog yang tepat terhadap pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kinerja pemerintah dan masyarakat. Dalam penyajiannya pun harus dengan mudah dimengerti, akurat serta informasi yang diberikan harus tepat waktu.

## 2.1 Conceptual Framework

Sebuah kerangka konseptual hipotesis dibangun berdasarkan *literature review* (Antoni, 2015). Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini akan meneliti sejauh mana pengaruh sosial teknologi terhadap budaya masyarakat yang telah ada dalam perubahan tantangan keterbukaan. Kerangka pemikiran teoretis dapat dilihat dalam gambar berikut ini



Gambar 1 : Conceptual Framework

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Transparansi, Informasi, dan Masyarakat.

Pada *e- government* kota Palembang belum adanya transparansi yang dilakukan baik di website resmi pemerintah kota Palembang maupun account pribadi pejabat pemerintahan kota Palembang (seperti walikota Harnojoyo ). Pada *account* ( facebook, instagram dan twitter ) pribadi milik walikota Harnojoyo sering membagikan kegiatan sehari – hari yang sedang dilakukannya, misalnya walikota lagi bergotong royong melakukan pembersihan lingkungan bersama warga setempat dan masih banyak lagi yang dibagikan oleh bapak walikota Palembang. Transparansi informasi sendiri yang ingin diperankan adalah data informasi yang tadinya hanya bisa menjadi konsumsi pegawai pemerintahan menjadi konsumsi publik (Masyarakat ). Negara yang menganut transparansi cenderung menghasilkan informasi lebih lanjut

dari pemerintah lain dan lebih mungkin untuk berbagi informasi ini (Lord, 2006)). Namun, semua upaya untuk mempromosikan keterbukaan dan mengurangi korupsi banyak dibentuk oleh budaya lingkungan suatu bangsa, mulai dari sikap masyarakat terhadap nilai Informasi untuk tingkat identifikasi oleh warga dengan pemerintah dan dari kelangsungan hidup pers independen untuk kebijakan informasi diberlakukan oleh pemerintah (Brown & Cloke, 2004). *Tools* yang tersedia untuk mengukur seberapa banyak dampak partisipasi terhadap informasi yang akan diberikan melalui sosial teknologi dan sosial media. dapat ditarik kesimpulan E- government Kota Palembang belum adanya transparansi dalam informasi.

### **3.2 Sosial Teknologi Informasi dan Transparansi Inisiatif**

Sosial Teknologi saat ini merupakan salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mempromosikan tata pemerintahan dan mempererat hubungan antara masyarakat dan pihak pemerintahan. Shim & Eom (2008) mengatakan bahwa TI dapat menjadi satu kunci perubahan bagi pemerintah dengan mempromosikan tata pemerintahan yang baik, memperkuat prakarsa reformasi berorientasi, mengurangi potensi perilaku korupsi, meningkatkan hubungan antara pegawai pemerintah dan warga, yang memungkinkan untuk pelacakan kegiatan dan aktivitas masyarakat, serta dapat memantau dan mengendalikan perilaku pegawai pemerintahan. Disamping itu juga, menurut Bhatnagar, (2003), TI telah berhasil mengurangi korupsi dan menjadikan pemerintah yang transparan melalui meningkatkan akses informasi dalam memastikan semua aturan yang transparan dan diterapkan untuk membangun kemampuan untuk melacak keputusan dan tindakan dari pemerintahan. Sosial Teknologi secara umum menunjukkan komitmen sebagai alat yang efektif untuk mengurangi korupsi, tapi sikap sosial dapat menurunkan efektivitasnya sebagai alat anti-korupsi (Shim & Eom, 2009). Studi kasus yang dilakukan oleh Shim & Eom, (2008) menunjukkan bahwa social teknologi memegang banyak potensi – dan telah menunjukkan manfaat dalam - anti-korupsi, khususnya oleh meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan manajerial lebih perilaku korupsi dan dengan mempromosikan akuntabilitas pemerintah dan transparansi.

### **3.3 Potensi Hambatan Upaya Transparansi**

Penggunaan teknologi dalam sosial teknologi dan sosial media tidak lepas dari hambatan yang ada seperti budaya. Hambatan ini telah ada dalam masyarakat dan berkomplikasi lebih lanjut sehingga membuat banyak pegawai pemerintahan yang sering ambivalen tentang partisipasi warga langsung dalam proses politik (Roberts, 2004). Meskipun demikian, menurut Bhatnagar (2003) ada sejumlah faktor yang mendorong sosial teknologi untuk mempromosikan transparansi dan memerangi korupsi, yaitu:

- Menyediakan informasi tentang peraturan pemerintah dan hak-hak warga negara;
- Memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah;
- Mempromosikan pemantauan tindakan pemerintah dan pengeluaran;
- Menyebarluaskan informasi tentang kinerja pemerintah;

- Proses pemerintah pembukaan, seperti catatan tanah, aplikasi untuk lisensi, dan status pembayaran pajak;
- Mengidentifikasi pejabat terpilih dan pegawai negeri sipil di bawah penyelidikan untuk kegiatan korupsi dan penipuan; dan
- Penyebaran informasi aset dan investasi dari pejabat terpilih dan sipil.

### **3.4 Membangun Budaya Transparansi Melalui Sosial Teknologi**

Membangun budaya transparansi melalui sosial teknologi dan sosial media dapat dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dengan penyajian informasi yang akan diberikan kepada masyarakat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti kebiasaan, sifat, tradisi dan kebijakan. Sehingga, masyarakat dapat mendukung dalam pengembangan transparansi ini tersendiri dengan cara yang sangat mudah, seperti masyarakat harus melaporkan dengan kata yang mudah dimengerti serta tidak memprovokasi pihak pemerintah dalam penyampaian keluhan yang ada. Contohnya, pada tahun 1999, China mulai menangkap warga untuk tulisan-tulisan mereka yang diposting di Internet dan pada tahun 2002, pemerintah China menutup 200 dari 2.400 Internet kafe di negara tersebut (Dann & Haddow, 2008; Klotz, 2004). Jadi dapat disimpulkan demi tercapainya pemerintahan yang transparan harusnya memiliki dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat secara baik.

### **3.5 Sosial Teknologi Merupakan Kunci Perubahan**

Untuk menjadi kunci perubahan, banyak hal yang harus diperhatikan seperti dalam penggunaan social teknologi. Pertama, akses yang dimiliki pemerintah tidak mempersulit suatu keadaan, masyarakat harus memiliki kepercayaan yang besar dalam menerima informasi dari sosial teknologi, pemberdayaan masyarakat harus seimbang, memiliki nilai sosial yang kuat dan tercapainya pemerintahan yang memiliki birokrasi terarah. Disisi lain, aplikasi media sosial dan internet, memiliki potensi untuk meningkatkan budaya keterbukaan. Dalam kampanye 2007, Calon Perdana Menteri Australia, Rupert Murdoch menggunakan media cetak dan elektronik yang dimilikinya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat serta melaporkan hasil jajak pendapat mereka sendiri (Bruns, 2008). Akibatnya, *blog* dan jaringan sosial *online* lainnya memainkan besar bagian dengan memberikan pandangan yang berbeda sebagai penyeimbang liputan media. Adanya upaya yang gigih oleh  *blogger* dan warga di Australia untuk menetralsir dan menangkai berita industri media (Bruns, 2008, hal. 66). Dapat diperoleh kesimpulan bahwa Teknologi sosial sangat berperan sebagai media penyeimbang bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

## **4 . Kesimpulan**

Dari studi literature ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menciptakan pemerintahan yang transparan tidaklah mudah tanpa adanya dukungan yang baik

dari pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya pemahaman budaya setiap lingkungan maka dengan muda menciptakan pemerintahan yang transparan sebagai kunci perubahan. Adapun hasil penelitian berupa konsep yang terdiri dari faktor-faktor sosial teknologi *e-government* dan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya melalui pendekatan *quantitative* dan *qualitative* riset.

## Referensi

1. Antoni, Darius. (2015). *Critical Factors of Information Technology Infrastructure Quality for Enhancing Environmental Competencies of the Indonesian Organization*.
2. Antoni, Darius. (2015). *FaktorFaktor Usability Internet Banking di Indonesia*.
3. Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Hansen, D. (2012). *The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations*. *Government Information Quarterly*, 29(1), 30–40.
4. Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Justin. (2010). *Using ICT's create a culture of transparency : E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies*. *Government Information Quarterly*, 27(1), 264-271.
5. Bhatnagar, S. (2003). *E-government and access to information*. *Global Corruption Report 2003*. Washington DC: Transparency International.
6. Braman, S. (2006). *Change of state: Information, policy, and power*. Cambridge, MA:Massachusetts Institute of Technology Press.
7. Brito, J. (2008). Hack, mash, & peer: Crowdsourcing government transparency. *Columbia Science and Technology Law Review*, 9, 119–157.
8. Brown, E., & Cloke, J. (2004). *Neoliberal reform, governance, and corruption in the South: Assessing the international anti-corruption crusade*. *Antipode*, 36(2), 272–294.
9. Brown, E., & Cloke, J. (2005). *Neoliberal reform, governance and corruption in Central America: Exploring the Nicaraguan case*. *Political Geography*, 24, 601–630.
10. Bruns, A. (2008). *Life beyond the public sphere: Towards a networked model for political deliberation*. *Information Polity*, 13, 65–79.
11. Dann, G. E., & Haddow, N. (2008). *Just doing business, or doing just business: Google, Microsoft, Yahoo!, and the business of censoring China's Internet*. *Journal of Business Ethics*, 79, 219–234.
12. Hidayat, Khoirul (2012), *Peran Electronic Government dan Relasi Media Massa Lokal dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di provinsi NTB*
13. Jaeger, P. T., Bertot, J. C., & McClure, C. R. (2004). *The effects of the Children's Internet Protection Act (CIPA) in public libraries and its implications for research: A statistical, policy, and legal analysis*. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 55(13), 1131–1139.
14. Kristene Unsworth, 2012, *Transparency, Participation, Cooperation: A Case Study Evaluating Twitter as a Social Media Interaction Tool in the US Open Government Initiative*, USA.
15. Kurniasih, Dewi (2014), *Interaksi Sosial dalam Implementasi E-Government*
16. Lord, K. M. (2006). *The perils and promise of global transparency*. Albany, NY: State University Press of New York.
17. Mergel, Inez (2013), *A frame work for interpreting social media interactions in the public sector 327 – 334*, Department of Public Administration and International Affairs ,Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 436 Crouse-Hinds Hall,Syracuse, NY13244, USA
18. Shim, D. C., & Eom, T. H. (2008). *E-government and anti-corruption: Empirical analysis of international data*. *International Journal of Public Administration*, 31, 298–316.

19. Shim, D. C., & Eom, T. H. (2009). *Anticorruption effects of information and communication technology (ICT) and social capital. International Review of Administrative Sciences*, 75, 99–116.
20. Welta Fretty (2013), *Perancangan Social Networking sebagai media informasi bagi Pemerintahan*